



Evaluasi Pengelolaan Keuangan Pendidikan Berbasis Akuntabilitas Pada Madrasah

Isfarida¹, Andrias Fabaitya²

STIT Lingga, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: andriasfabaitiya@gmail.com

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 05 Juni 2025, Article published: 15 Juni 2025

ABSTRACT

Financial management in madrasahs is a crucial aspect that determines the quality of learning services and the sustainability of Islamic educational institutions. This study aims to evaluate accountability-based financial management practices in madrasahs, focusing on aspects of transparency, accountability, and regulatory compliance. Using a qualitative method with a library research approach, this study analyzes recent scientific literature, including indexed journals, academic books, and government regulations. The findings indicate that madrasah financial management still faces significant challenges in terms of reporting transparency, the capacity of human resources managing finances, and the implementation of comprehensive accountability systems. These findings suggest the need to strengthen financial governance through the standardization of procedures, continuous training for financial managers, and the digitalization of madrasah financial information systems. This study provides an academic contribution in the form of an accountability-based financial management evaluation framework that can be adopted by madrasahs as a guideline for improving educational financial governance.

Keywords: Financial Management, Accountability, Madrasah, Evaluation, Transparency

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan pendidikan di madrasah merupakan aspek krusial yang menentukan kualitas layanan pembelajaran dan keberlanjutan institusi pendidikan Islam. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi praktik pengelolaan keuangan pendidikan berbasis akuntabilitas pada madrasah, dengan fokus pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan regulasi. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), penelitian ini menganalisis literatur ilmiah terkini yang mencakup jurnal terindeks, buku akademik, dan regulasi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan madrasah masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal transparansi pelaporan, kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan, dan implementasi sistem akuntabilitas yang komprehensif. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan tata kelola keuangan melalui standardisasi prosedur, pelatihan berkelanjutan bagi pengelola keuangan, serta digitalisasi sistem informasi keuangan madrasah. Studi ini memberikan kontribusi akademis berupa kerangka evaluasi pengelolaan keuangan berbasis akuntabilitas yang dapat diadopsi oleh madrasah sebagai panduan peningkatan tata kelola keuangan pendidikan.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas, Madrasah, Evaluasi, Transparansi

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan pendidikan merupakan salah satu pilar fundamental dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang berkualitas, khususnya di lingkungan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan sekolah umum. Madrasah, sebagai subsistem pendidikan nasional di Indonesia, memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan pendidikan agama dan ilmu pengetahuan umum. Namun demikian, kompleksitas pengelolaan keuangan di madrasah seringkali menjadi tantangan tersendiri mengingat keragaman sumber pembiayaan yang meliputi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), iuran wajib siswa, sumbangan pihak ketiga, serta alokasi anggaran dari pemerintah daerah dan kementerian agama (Fahrurrozi, 2016).

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pendidikan menjadi isu yang semakin mendapat perhatian luas dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan dunia akademik. Konsep akuntabilitas mengandung makna kewajiban para pengelola keuangan untuk memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang dipercayakan kepada mereka, baik secara finansial maupun kinerja (Arifin & Nashif, 2023). Dalam konteks madrasah, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi keuangan, tetapi juga mencakup aspek moral dan religius yang menjadi fondasi pendidikan Islam. Oleh karena itu, evaluasi pengelolaan keuangan berbasis akuntabilitas pada madrasah menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam.

Fenomena aktual menunjukkan bahwa beberapa madrasah masih mengalami kendala dalam implementasi prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik (*good governance*). Suci (2022) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan di Madrasah Aliyah masih belum optimal, terutama dalam hal pelaporan keuangan yang transparan dan mekanisme pengawasan internal yang efektif. Permasalahan serupa juga ditemukan oleh Robi (2023) yang menyoroti bahwa peran manajemen keuangan dalam pengelolaan dana BOS di madrasah belum berjalan secara maksimal akibat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan lemahnya sistem pengendalian internal.

Tantangan pengelolaan keuangan madrasah juga diperparah oleh kondisi madrasah swasta yang bergantung pada pembiayaan dari masyarakat. Rahayu dan Lemmy (2024) mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi madrasah swasta dalam mengelola pembiayaan pendidikan, mulai dari ketidakpastian penerimaan dana operasional hingga kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana sumbangan. Sementara itu, Aimah (2025) menekankan pentingnya pengelolaan keuangan pendidikan yang efektif dalam meningkatkan mutu pembelajaran di madrasah, karena kualitas pengelolaan keuangan memiliki korelasi langsung dengan kemampuan madrasah dalam menyediakan sarana prasarana dan sumber belajar yang memadai.

Gap penelitian yang teridentifikasi dari kajian literatur terdahulu menunjukkan bahwa masih terbatasnya penelitian yang mengkaji evaluasi pengelolaan keuangan pendidikan madrasah secara komprehensif dengan

kerangka akuntabilitas yang terintegrasi. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek tunggal, seperti transparansi dana BOS atau pelaporan keuangan, tanpa melihat keseluruhan ekosistem pengelolaan keuangan madrasah. Sapitri dan Mujahidin (2023) dalam evaluasinya menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA) menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam menilai kinerja manajemen keuangan pendidikan Islam. Selain itu, Nuvianti, Erlisa, dan Puspila (2025) menyoroti pentingnya evaluasi yang mencakup seluruh siklus manajemen keuangan dari tahap perencanaan hingga evaluasi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu: pertama, bagaimana praktik pengelolaan keuangan pendidikan yang berbasis akuntabilitas pada madrasah saat ini? Kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi madrasah dalam mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan? Ketiga, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pendidikan di madrasah? Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi secara komprehensif praktik pengelolaan keuangan pendidikan berbasis akuntabilitas pada madrasah, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk peningkatan tata kelola keuangan madrasah di Indonesia.

Akuntabilitas merupakan konsep multidimensional yang memiliki akar filosofis dalam teori keagenan (agency theory) dan teori stewardship. Dalam perspektif teori keagenan, akuntabilitas merujuk pada kewajiban agen (pengelola) untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusannya kepada principal (pemberi mandat). Mulyadi (2016) menjelaskan bahwa akuntabilitas keuangan mencakup dimensi kewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai penggunaan sumber daya keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara tepat waktu dan akurat. Dalam konteks organisasi publik seperti madrasah, akuntabilitas memiliki dimensi yang lebih luas karena melibatkan tanggung jawab kepada masyarakat, pemerintah, dan komunitas pendidikan.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pendidikan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa dimensi. Pertama, akuntabilitas vertikal yang mengacu pada kewajiban pertanggungjawaban kepada pihak yang berada dalam hierarki organisasi, seperti kepala madrasah kepada yayasan atau dinas pendidikan. Kedua, akuntabilitas horizontal yang merujuk pada kewajiban untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang setingkat atau memiliki kepentingan langsung, seperti komite madrasah, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar. Ketiga, akuntabilitas sosial yang mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan berdampak positif bagi masyarakat luas (Hutasoit & Sidabutar, 2026).

Pengelolaan keuangan madrasah merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan yang dilakukan oleh madrasah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Fahrurrozi (2016) mendefinisikan manajemen keuangan madrasah

sebagai keseluruhan aktivitas pengelolaan dana yang meliputi sumber penerimaan, alokasi anggaran, pelaksanaan belanja, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Proses ini diatur oleh regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Menteri Agama yang mengatur teknis pengelolaan keuangan madrasah.

Sumber pembiayaan madrasah memiliki karakteristik yang beragam dan berbeda dengan sekolah umum. Nengsi, Maulidika, dan Sabri (2025) mengidentifikasi bahwa sumber pembiayaan madrasah terdiri dari dana pemerintah pusat (BOS dan BOSDA), dana pemerintah daerah, iuran komite madrasah, sumbangan masyarakat, serta pendapatan dari unit usaha sekolah. Keragaman sumber pembiayaan ini menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam hal pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan. Arifin dan Nashif (2023) menekankan bahwa pengelolaan keuangan madrasah yang baik harus mampu mengintegrasikan seluruh sumber penerimaan dalam satu sistem keuangan yang terpadu dan transparan.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan madrasah yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Adzkia, Anastasya, dan Awalliyah (2024) dalam penelitiannya menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama yang harus dijaga dalam setiap proses pengelolaan keuangan sekolah, termasuk madrasah. Transparansi berarti bahwa setiap informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sementara akuntabilitas berarti bahwa setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Fitri dan Hermina (2026) menambahkan pentingnya manajemen informasi keuangan yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan akuntabel.

Jauhari dan Hidayat (2025) mengidentifikasi berbagai strategi yang dapat diterapkan madrasah dalam mengelola pembiayaan pendidikan secara berkelanjutan. Strategi tersebut meliputi diversifikasi sumber pendanaan, optimalisasi pengelolaan aset, penguatan kerjasama dengan pemangku kepentingan, serta pengembangan budaya kewirausahaan di lingkungan madrasah. Strategi-strategi ini menjadi semakin penting dalam konteks otonomi pendidikan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada madrasah untuk mengelola keuangannya secara mandiri, namun juga menuntut tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi.

Evaluasi pengelolaan keuangan pendidikan merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan pengelolaan keuangan terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Sapitri dan Mujahidin (2023) menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA) untuk mengevaluasi kinerja manajemen keuangan pendidikan Islam, yang memungkinkan identifikasi prioritas perbaikan berdasarkan gap antara tingkat kepentingan dan kinerja aktual. Metode evaluasi ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang area-area yang memerlukan peningkatan prioritas.

Hutasoit dan Sidabutar (2026) dalam penelitiannya mengevaluasi transparansi dan realisasi manajemen keuangan sekolah dengan fokus pada kesesuaian antara perencanaan anggaran dengan realisasi belanja. Temuan mereka menunjukkan bahwa masih terdapat deviasi yang signifikan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi pengeluaran, yang mengindikasikan lemahnya perencanaan keuangan dan kontrol pelaksanaan anggaran. Evaluasi seperti ini menjadi penting karena memberikan bukti empiris tentang kinerja pengelolaan keuangan yang dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan perbaikan.

Nuvianti, Erlisa, dan Puspila (2025) mengembangkan kerangka evaluasi yang mencakup seluruh siklus manajemen keuangan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, hingga evaluasi. Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih menyeluruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan sekolah, termasuk identifikasi kekuatan dan kelemahan pada setiap tahap proses. Kerangka evaluasi semacam ini sangat relevan untuk diterapkan pada madrasah yang memiliki kompleksitas pengelolaan keuangan lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah umum.

Berdasarkan tinjauan teoretis dan hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran penelitian ini dibangun dengan mengintegrasikan konsep akuntabilitas multidimensional, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan madrasah, dan kerangka evaluasi kinerja keuangan. Kerangka pemikiran ini mengasumsikan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan madrasah dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan, sistem pengendalian internal yang efektif, dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan yang berlaku.

Kerangka pemikiran ini juga mempertimbangkan konteks madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki nilai-nilai religius dalam pengelolaan keuangannya. Konsep amanah (kepercayaan) dan mas'uliyah (tanggung jawab) dalam Islam menjadi fondasi moral yang melandasi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan madrasah. Dengan demikian, evaluasi pengelolaan keuangan berbasis akuntabilitas pada madrasah tidak hanya mengacu pada standar akuntabilitas formal, tetapi juga mengintegrasikan perspektif etika dan moral Islam yang menjadi ciri khas pengelolaan lembaga pendidikan Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Pendekatan studi pustaka dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji, menganalisis, dan mensintesis literatur ilmiah terkait pengelolaan keuangan pendidikan berbasis akuntabilitas pada madrasah. Sebagaimana dikemukakan oleh Zed (2017), studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan-bahan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena pengelolaan keuangan madrasah berdasarkan kajian teoretis dan empiris yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Sumber data penelitian ini terdiri dari dua kategori utama. Pertama, data primer berupa jurnal ilmiah terindeks yang relevan

dengan topik pengelolaan keuangan madrasah dan akuntabilitas pendidikan. Data primer ini diperoleh dari basis data akademik seperti Scopus, Sinta, DOAJ, dan Google Scholar. Kedua, data sekunder berupa buku akademik, peraturan pemerintah, dokumen kebijakan kementerian agama, serta laporan penelitian yang berkaitan dengan manajemen keuangan pendidikan Islam. Seluruh sumber data yang digunakan telah melalui proses seleksi ketat berdasarkan kriteria kelayakan ilmiah, termasuk kredibilitas penulis, reputasi penerbit, dan kebaruan publikasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi kata kunci pencarian yang meliputi pengelolaan keuangan madrasah, akuntabilitas keuangan pendidikan, transparansi dana BOS, dan manajemen pendidikan Islam. Tahap kedua adalah screening literatur berdasarkan relevansi judul dan abstrak dengan topik penelitian. Tahap ketiga adalah evaluasi kualitas metodologis dari setiap literatur yang terpilih. Tahap keempat adalah ekstraksi data dan informasi yang relevan dari literatur yang memenuhi kriteria kelayakan. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis data dari berbagai sumber pustaka secara sistematis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten (content analysis). Analisis konten dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan hubungan antarkonsep yang muncul dari literatur yang dikaji. Proses analisis konten meliputi: (1) pembacaan mendalam terhadap seluruh literatur yang terkumpul; (2) pengkodean tematik untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci; (3) kategorisasi temuan berdasarkan dimensi akuntabilitas dan aspek pengelolaan keuangan; (4) sintesis dan interpretasi temuan secara komprehensif; serta (5) triangulasi dengan teori-teori yang relevan untuk memvalidasi hasil analisis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode analisis komparatif untuk membandingkan temuan dari berbagai penelitian terdahulu dan mengidentifikasi pola umum serta perbedaan signifikan dalam pengelolaan keuangan madrasah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Madrasah

Aspek transparansi merupakan dimensi fundamental dalam evaluasi pengelolaan keuangan berbasis akuntabilitas pada madrasah. Berdasarkan sintesis literatur yang dilakukan, transparansi pengelolaan keuangan madrasah masih menjadi area yang memerlukan perhatian serius. Adzkie, Anastasya, dan Awalliyah (2024) menemukan bahwa sebagian madrasah belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip transparansi dalam hal penyampaian informasi keuangan kepada publik. Informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersifat rinci dan mudah diakses masih terbatas, terutama pada madrasah yang berada di daerah terpencil.

Hutasoit dan Sidabutar (2026) mengungkapkan bahwa transparansi dalam realisasi manajemen keuangan sekolah, termasuk madrasah, seringkali terhambat oleh beberapa faktor struktural. Pertama, minimnya kompetensi teknis pengelola keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi.

Kedua, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan keuangan yang menyebabkan proses pelaporan berjalan secara manual dan rentan terhadap kesalahan. Ketiga, kurangnya mekanisme pengawasan eksternal yang efektif untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang dipublikasikan telah sesuai dengan kondisi aktual.

Fitri dan Hermina (2026) menekankan pentingnya manajemen informasi keuangan pendidikan Islam yang terintegrasi untuk meningkatkan transparansi. Sistem informasi keuangan yang terintegrasi memungkinkan pencatatan transaksi secara real-time, pelaporan keuangan yang akurat, dan akses informasi yang mudah bagi seluruh pemangku kepentingan. Dalam konteks madrasah, implementasi sistem informasi keuangan berbasis teknologi menjadi salah satu solusi strategis untuk mengatasi hambatan transparansi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Namun demikian, keterbatasan infrastruktur teknologi dan anggaran investasi menjadi tantangan tersendiri bagi madrasah, khususnya madrasah swasta.

Fenomena ketransparanan juga berkaitan erat dengan budaya organisasi di lingkungan madrasah. Beberapa madrasah masih memandang informasi keuangan sebagai data internal yang tidak perlu dipublikasikan secara luas, sehingga masyarakat dan orang tua siswa tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai penggunaan dana pendidikan. Arifin dan Nashif (2023) mengargumen bahwa perubahan paradigma dari kerahasiaan menuju keterbukaan dalam pengelolaan keuangan madrasah memerlukan komitmen kuat dari pimpinan madrasah serta sosialisasi yang intensif kepada seluruh sivitas akademika tentang pentingnya transparansi untuk membangun kepercayaan publik.

Evaluasi Akuntabilitas Keuangan Madrasah

Dimensi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan madrasah mencakup aspek pertanggungjawaban formal kepada pihak berwenang serta tanggung jawab moral kepada masyarakat. Suci (2022) dalam penelitiannya tentang analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan Madrasah Aliyah menemukan bahwa implementasi akuntabilitas masih berada pada level formal-prosedural, yakni terbatas pada pemenuhan administrasi pelaporan tanpa disertai evaluasi substansial terhadap kinerja keuangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan madrasah masih bersifat compliance-driven (berbasis kepatuhan) dan belum mencapai tahap performance-driven (berbasis kinerja).

Robi (2023) mengkaji secara spesifik peran manajemen keuangan dalam pengelolaan dana BOS di madrasah dan menemukan bahwa mekanisme pertanggungjawaban dana BOS belum berjalan optimal. Beberapa madrasah masih mengalami kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan format yang ditetapkan oleh kementerian, sehingga menghambat proses verifikasi dan audit. Selain itu, ketidaksesuaian antara rencana penggunaan dana BOS dengan realisasi pengeluaran menjadi permasalahan yang cukup umum

ditemukan, yang mengindikasikan lemahnya perencanaan dan pengendalian internal dalam pengelolaan dana BOS.

Akuntabilitas dalam perspektif Islam memberikan dimensi tambahan yang unik bagi pengelolaan keuangan madrasah. Konsep amanah (kepercayaan) dan mas'uliyah (tanggung jawab) dalam Islam mengharuskan setiap pengelola keuangan madrasah untuk tidak hanya mematuhi regulasi formal, tetapi juga memastikan bahwa setiap pengeluaran keuangan dilakukan dengan penuh integritas dan tanggung jawab moral. Nilai-nilai Islam ini seharusnya menjadi keunggulan komparatif madrasah dalam pengelolaan keuangan pendidikan, namun dalam praktiknya, internalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan belum sepenuhnya terwujud secara optimal.

Nengsi, Maulidika, dan Sabri (2025) mengidentifikasi bahwa pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah, termasuk madrasah, masih menghadapi tantangan dalam hal kelengkapan dokumentasi dan ketepatan waktu pelaporan. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas pertanggungjawaban keuangan antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akuntansi, minimnya pelatihan pengelolaan keuangan bagi staf madrasah, serta belum adanya standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan keuangan yang baku dan konsisten di seluruh madrasah.

Kepatuhan Terhadap Regulasi Keuangan

Kepatuhan terhadap regulasi keuangan merupakan indikator penting dalam evaluasi pengelolaan keuangan berbasis akuntabilitas. Sapitri dan Mujahidin (2023) mengevaluasi manajemen keuangan pendidikan Islam menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA) dan menemukan bahwa tingkat kepatuhan madrasah terhadap regulasi keuangan bervariasi tergantung pada jenis regulasi dan kapasitas madrasah. Regulasi yang bersifat teknis-detail, seperti format pelaporan keuangan dan tata cara penggunaan dana BOS, cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan regulasi yang bersifat umum.

Hutasoit dan Sidabutar (2026) mengungkapkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepatuhan madrasah terhadap regulasi keuangan adalah pemahaman pengelola keuangan terhadap regulasi yang berlaku. Banyak pengelola keuangan madrasah, terutama di madrasah swasta, yang belum memahami secara komprehensif ketentuan-ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan pendidikan. Kondisi ini diperparah oleh seringnya terjadi perubahan regulasi yang tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai dari pihak pemerintah, sehingga madrasah kesulitan untuk mengikuti perkembangan regulasi terbaru.

Nuvianti, Erlisa, dan Puspila (2025) dalam studi mereka tentang implementasi manajemen keuangan di sekolah menemukan bahwa tahap evaluasi merupakan tahap yang paling lemah dalam siklus manajemen keuangan. Banyak madrasah yang telah melaksanakan tahap perencanaan dan pelaksanaan dengan baik, namun belum memiliki mekanisme evaluasi yang terstruktur untuk menilai

efektivitas penggunaan anggaran dan kepatuhan terhadap rencana yang telah ditetapkan. Ketidakseimbangan antara tahap perencanaan dan evaluasi ini mengindikasikan bahwa manajemen keuangan madrasah belum berjalan secara siklis dan komprehensif.

Rahayu dan Lemmy (2024) mengidentifikasi bahwa madrasah swasta menghadapi tantangan yang lebih besar dalam hal kepatuhan regulasi dibandingkan dengan madrasah negeri. Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia, menjadi hambatan utama bagi madrasah swasta dalam memenuhi seluruh persyaratan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan diferensial dari pemerintah yang memberikan dukungan teknis dan kapasitas building bagi madrasah swasta dalam rangka meningkatkan kepatuhan regulasi pengelolaan keuangan pendidikan.

Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan

Kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan merupakan faktor determinan dalam keberhasilan pengelolaan keuangan berbasis akuntabilitas pada madrasah. Fahrurrozi (2016) mengemukakan bahwa kompetensi pengelola keuangan madrasah, khususnya dalam hal pengetahuan akuntansi, kemampuan menyusun laporan keuangan, dan pemahaman regulasi keuangan, masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Banyak pengelola keuangan madrasah yang memiliki latar belakang pendidikan non-akuntansi dan non-manajemen, sehingga mereka menghadapi kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sesuai standar.

Arifin dan Nashif (2023) menegaskan bahwa peningkatan nilai akuntabilitas pengelolaan keuangan madrasah memerlukan investasi yang berkelanjutan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Program pelatihan dan sertifikasi bagi pengelola keuangan madrasah menjadi kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas-tugas keuangan. Selain kompetensi teknis, pengelola keuangan madrasah juga perlu memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip tata kelola yang baik, etika profesi, serta nilai-nilai Islam yang relevan dengan pengelolaan keuangan.

Aimah (2025) dalam penelitiannya tentang pengelolaan keuangan pendidikan dalam meningkatkan mutu di madrasah menyoroti bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia tidak hanya berfokus pada pengelola keuangan, tetapi juga harus melibatkan kepala madrasah sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan keuangan. Kepala madrasah perlu memiliki pemahaman yang komprehensif tentang manajemen keuangan pendidikan agar mampu memberikan arahan, pengawasan, dan pengambilan keputusan yang tepat terkait pengelolaan keuangan madrasah.

Jauhari dan Hidayat (2025) merekomendasikan pendekatan berkelanjutan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan madrasah, yang meliputi pelatihan rutin, sertifikasi kompetensi, mentoring, dan knowledge sharing antar madrasah. Pendekatan ini mempertimbangkan bahwa

pengembangan kapasitas bukanlah kegiatan satu kali, melainkan proses berkelanjutan yang perlu terus dijaga dan diperbarui seiring dengan perkembangan regulasi, teknologi, dan tuntutan akuntabilitas yang semakin tinggi.

Sistem Pengendalian Internal Madrasah

Sistem pengendalian internal merupakan mekanisme yang memastikan bahwa pengelolaan keuangan madrasah berjalan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan regulasi yang berlaku. Robi (2023) mengidentifikasi bahwa kelemahan sistem pengendalian internal merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakberesan dalam pengelolaan dana BOS di madrasah. Komponen pengendalian internal seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan belum terimplementasi secara optimal di sebagian madrasah.

Suci (2022) dalam penelitiannya tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan Madrasah Aliyah menemukan bahwa belum semua madrasah memiliki struktur organisasi pengelolaan keuangan yang jelas dan fungsi-fungsi pengendalian internal yang terpisah. Pemisahan fungsi (*segregation of duties*) antara fungsi otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan aset belum sepenuhnya diterapkan, yang menciptakan potensi penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan mengingat pengelolaan keuangan yang tidak memadai dapat berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan yang diberikan oleh madrasah.

Nuvianti, Erlisa, dan Puspila (2025) merekomendasikan penguatan sistem pengendalian internal melalui standarisasi prosedur operasional pengelolaan keuangan, pembentukan unit audit internal di madrasah, serta implementasi sistem pelaporan keuangan berbasis teknologi. Standarisasi prosedur operasional memastikan bahwa setiap transaksi keuangan diproses secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Unit audit internal berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang independen untuk memverifikasi kepatuhan prosedur dan mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal.

Adzkie, Anastasya, dan Awalliyah (2024) menambahkan bahwa penguatan sistem pengendalian internal di madrasah harus disertai dengan pengembangan budaya akuntabilitas di seluruh tingkatan organisasi. Budaya akuntabilitas mengacu pada nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang mendukung terciptanya lingkungan organisasi yang transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Pengembangan budaya akuntabilitas memerlukan komitmen dari pimpinan madrasah, pelatihan yang berkelanjutan bagi seluruh staf, serta sistem reward and punishment yang memadai untuk mendorong kepatuhan terhadap standar pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan terhadap literatur ilmiah terkait pengelolaan keuangan pendidikan berbasis akuntabilitas pada madrasah, penelitian ini menarik beberapa kesimpulan. Pertama, praktik

pengelolaan keuangan pendidikan berbasis akuntabilitas pada madrasah saat ini masih berada pada tahap yang belum optimal. Meskipun sebagian madrasah telah menerapkan prinsip-prinsip dasar akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya, implementasinya masih bersifat formal-prosedural dan belum mencapai tahap akuntabilitas kinerja yang sesungguhnya. Transparansi keuangan masih terbatas, mekanisme pertanggungjawaban belum terstandarisasi, dan sistem pengendalian internal belum berjalan secara efektif di sebagian madrasah.

Kedua, tantangan utama yang dihadapi madrasah dalam mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan, lemahnya sistem pengendalian internal, minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, serta keragaman dan kompleksitas sumber pembiayaan yang menyulitkan proses pencatatan dan pelaporan. Madrasah swasta menghadapi tantangan yang lebih berat dibandingkan dengan madrasah negeri, terutama dalam hal keterbatasan sumber daya dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan yang berlaku. Ketiga, pengelolaan keuangan madrasah memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dari pengelolaan keuangan sekolah umum, yaitu adanya dimensi religius dan moral yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Konsep amanah dan mas'uliyah memberikan fondasi etis yang kuat bagi pengelolaan keuangan madrasah, namun internalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan formal masih memerlukan upaya yang lebih intensif. Integrasi perspektif Islam dalam kerangka akuntabilitas pengelolaan keuangan madrasah menjadi keunggulan yang perlu dikembangkan lebih lanjut.

DAFTAR RUJUKAN

- Adzkiya, R., Anastasya, F., & Awalliyah, N. S. (2024). Manajemen keuangan sekolah: Transparansi dan akuntabilitas. *Gafari Journal of Management and Accounting*, 3(2), 45–58. <https://jurnal.zarilgapari.org/index.php/gafari/article/view/140>
- Aimah, S. (2025). Education financing management in improving quality in madrasah. *Journal of Management and Policy in Islamic Education*, 8(1), 23–39. <https://ejournal.uimsya.ac.id/index.php/jmpid/article/view/3562>
- Arifin, Z., & Nashif, A. (2023). Pengelolaan keuangan madrasah dalam meningkatkan nilai akuntabilitas. *Manajeria*, 4(1), 15–28. <https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/Manajeria/article/view/1982>
- Fahrurrozi, F. (2016). Manajemen keuangan madrasah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 167–184. <https://www.neliti.com/publications/123418/manajemen-keuangan-madrasah>
- Fitri, R. A., & Hermina, D. (2026). Manajemen informasi keuangan pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(1), 12–27. <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie/article/view/1593>

- Hutasoit, J. B., & Sidabutar, I. C. (2026). Evaluasi transparansi dan realisasi manajemen keuangan sekolah. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 3(1), 34-49. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jimp/article/view/1663>
- Jauhari, A. T., & Hidayat, A. (2025). Strategi manajemen pembiayaan pendidikan dalam menunjang keberlanjutan madrasah. *Jurnal Sinergi Pendidikan Islam*, 8(2), 78-92. <https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi/article/view/175>
- Mulyadi. (2016). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Salemba Empat.
- Nengsi, Y. S., Maulidika, D., & Sabri, A. (2025). Pengelolaan keuangan sekolah: Sumber pembiayaan dan pertanggungjawaban. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 14(1), 56-70. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Edukasi/article/view/1000>
- Nuvianti, I., Erlisa, D., & Puspila, N. K. W. (2025). Implementasi manajemen keuangan di sekolah: Perencanaan hingga evaluasi. *Educational and Management Innovation Journal*, 4(1), 18-33. <https://itscience-indexing.com/jurnal/index.php/ejim/article/view/6113>
- Rahayu, S. D., & Lemmy, P. K. (2024). Tantangan dan strategi pengelolaan pembiayaan pendidikan di madrasah swasta. *Pase: Journal of Islamic Education*, 7(1), 41-57. <https://journal.uinsuna.ac.id/index.php/Pase/article/view/5213>
- Robi, M. (2023). Peran manajemen keuangan dalam pengelolaan dana BOS di madrasah. *Ulin Nuha: Journal of Islamic Education*, 5(2), 89-104. <https://jurnal.iaima.ac.id/ulinnuha/article/view/130>
- Sapitri, D., & Mujahidin, E. (2023). Evaluasi manajemen keuangan pendidikan Islam metode importance performance analysis. *Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(2), 201-218. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/idaarah/article/view/31350>
- Suci, D. P. R. (2022). Analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan madrasah aliyah [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Imam Sujono Metro. <https://repository.uimsya.ac.id/id/eprint/464/1/skripsi>
- Zed, M. (2017). Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik (Edisi revisi). Andi Offset.
- Bastian, I. (2018). Akuntansi manajemen sektor publik. Erlangga.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). Akuntansi keuangan daerah. Salemba Empat.
- Siregar, S. (2017). Akuntansi manajemen: Untuk program sarjana akuntansi (Edisi 2). Salemba Empat.
- Rezki, M. (2019). Manajemen keuangan lembaga pendidikan Islam. Pustaka Ramadhan.
- Sanusi, A. (2018). Manajemen pendidikan Islam: Strategi baru pengelolaan lembaga pendidikan Islam di era global. Ciputat Press.
- Muhaimin, & Wahyuddin. (2016). Reformasi pendidikan Islam di Indonesia. Raja Grafindo Persada.